

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
PERDATA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURJANNAH

NIM: 10500113251

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurjannah
NIM : 10500113251
Tempat/Tgl. Lahir : Ritaya, 09 April 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Ritaya Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
PERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Juli 2017

Penulis,

NURJANNAH
NIM:10500113251

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Perdata"**, yang disusun oleh saudari **Nurjannah, NIM: 10500113251**, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 14 Agustus 2017
21 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Erlina, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Marilang, M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Munir Salim, M.H	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 1993003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan Perdata”**. Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. serta kepada sekalian sahabat dan keluarganya yang telah memberi contoh dan teladan yang sebaik-baiknya kepada kita umat manusia dalam menjalani kehidupan sebagai muslim yang baik.

Skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Orang tua penulis tercinta, Muh. Saleh dan St. Sigollo Nia, atas pengorbanannya yang tidak terukur kepada penulis, sehingga penulis dapat menjadi sesosok manusia seperti sekarang ini.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
4. Ibu Istiqamah, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan bantuan saran dan kritik demi selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Marilang, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Drs. H. Munir Salim, MH. selaku Pembimbing II yang selalu membantu dengan memberi saran dan kritik serta kemudahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Hukum dan para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama penulis menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Mochammad Djonaidie, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

9. Bapak Amiruddin Mahmud, SH., MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Abdul Latief, SH. selaku Ketua Panitera dan Muhammad Yusuf, SH. selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah meluangkan waktunya memberikan penjelasan kepada penulis terkait dengan judul skripsi yang penulis teliti dan semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.
10. Kakak-kakak dan adik tercinta, Hasnah, Hasnih, Muliati, Agus Salim dan Nastain yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman di jurusan Ilmu Hukum terkhusus kepada angkatan 2013 kelas IH E dan IH F yang telah memberikan banyak kesan selama penulis menempuh proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Sahabat-sahabat penulis di kampus, terkhusus kepada Eka Agusriani Syamsur, SH, Nurhidayah, SH, Rezky Amelia, SH, Sri Sulviana, SH, Nurul Jamila, Ardian, Amir, Ashar, Alka, Mardas semoga kebersamaan kita semua selalu terpatrit dalam lubuk hati yang paling dalam.
13. Kakak-kakak dan adik-adik di Gerakan Pramuka Ambalan Pa Patta terkhusus kepada sahabat Sukmawati dan Nurul Hijrah yang selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman alumni DKV 013 serta rekan-rekan di Ramppala Sul-Sel yang selalu menghibur penulis dikala suka maupun duka selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, semoga Allah swt. senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Samata, 21 Juni 2017

Penulis,

(NURJANNAH)
NIM: 10500113251



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	13-41
A. Pengertian Putusan.....	13
B. Syarat-syarat Putusan.....	22
C. Putusan yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial.....	32
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	42-47
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Instrumen Penelitian.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Populasi dan Sampel.....	46
G. Analisis Data.....	46
H. Pengujian Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48-69
A. Syarat-syarat Putusan Yang Dapat Dieksekusi.....	48
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi.....	60
BAB V PENUTUP.....	71-72
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73-74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

NAMA : NURJANNAH
NIM : 10500113251
JUDUL : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Dengan adanya putusan atas suatu perkara belumlah berarti persoalan telah selesai karena seseorang yang menang belum pasti memperoleh haknya sebagaimana yang ia mohonkan kepada pengadilan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang pasti berupa pelaksanaan putusan, baik secara sukarela maupun secara paksa atau eksekusi. Dalam hal ini peneliti membatasinya dengan mengemukakan rumusan masalah mengenai bagaimana syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris (Pendekatan Sosiologi Hukum) yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap Hakim, Panitera, Juru Sita dan masyarakat yang pernah terlibat perkara eksekusi dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum), permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan telah diajukan oleh pemohon eksekusi dan pemohon eksekusi telah membayar biaya eksekusi. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi adalah ketua pengadilan menyatakan putusan tersebut non eksekutabel, biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon, adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga, adanya permohonan peninjauan kembali, dan termohon mengerahkan massa ditempat barang yang akan dieksekusi.

Peneliti berharap agar pihak pengadilan dapat melaksanakan putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Perundang-Undangan dengan tidak lupa mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan putusan (eksekusi). Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, panitera/jurusita, dan aparat setempat sehingga proses eksekusi putusan dapat berjalan lancar demi terwujudnya kepastian hukum dalam prakteknya di lapangan khususnya dalam perkara perdata.

ABSTRAK

NAMA : NURJANNAH
NIM : 10500113251
**JUDUL : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA**

Dengan adanya putusan atas suatu perkara belumlah berarti persoalan telah selesai karena seseorang yang menang belum pasti memperoleh haknya sebagaimana yang ia mohonkan kepada pengadilan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang pasti berupa pelaksanaan putusan, baik secara sukarela maupun secara paksa atau eksekusi. Dalam hal ini peneliti membatasinya dengan mengemukakan rumusan masalah mengenai bagaimana syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Empiris (Pendekatan Sosiologi Hukum) yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap Hakim, Panitera, Juru Sita dan masyarakat yang pernah terlibat perkara eksekusi dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum), permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan telah diajukan oleh pemohon eksekusi dan pemohon eksekusi telah membayar biaya eksekusi. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi adalah ketua pengadilan menyatakan putusan tersebut non eksekutabel, biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon, adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga, adanya permohonan peninjauan kembali, dan termohon mengerahkan massa ditempat barang yang akan dieksekusi.

Peneliti berharap agar pihak pengadilan dapat melaksanakan putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Perundang-Undangan dengan tidak lupa mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan putusan (eksekusi). Dengan demikian perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, panitera/jurusita, dan aparat setempat sehingga proses eksekusi putusan dapat berjalan lancar demi terwujudnya kepastian hukum dalam prakteknya di lapangan khususnya dalam perkara perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Dan proses interaksi itu tidak selamanya berjalan dengan baik, namun ada kalanya dihiasi dengan konflik horizontal sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya suatu institusi yang menjadi pemutus konflik tersebut. Dalam kehidupan bernegara, institusi ini menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga peradilan.

Dalam pengkajian sosiologi hukum, pengadilan dipelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hakim-hakim yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam. Dipelajari pula dampak-dampak keputusan pengadilan terhadap masyarakat. Berdasarkan semua itu, ahli sosiologi hukum mempelajari pengadilan yang objeknya adalah manusia, baik kelakuan, pendidikan, pergaulan, asal-usul sosial para hakim maupun merupakan variabel-variabel yang dicoba dilihat dalam kaitannya dengan kelakuan dalam jabatan hakim.¹

Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuannya untuk

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 10.

menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Sosiologi hukum akan dapat mengingatkan orang kepada adanya tujuan-tujuan yang demikian itu. Ilmu ini akan mampu juga memberikan informasi tentang hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan diatas.²

Tujuan pihak-pihak yang berperkar menyerahkan perkara-perkaranya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi dengan adanya putusan pengadilan bukan berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, terkhusus kepada putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) maka perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain pencari keadilan mempunyai tujuan akhir yaitu agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan.

Hakim dalam memutus perkara, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya, dari hal tersebut maka akan:

1. Tersimpulkan hukumnya; atau
2. Terdapat peraturan-peraturan hukumnya; atau

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 12.

3. Hakim menemukan hukum (*Judge made law*). Sedangkan nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketetapan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwanya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.
4. Sumber-sumber hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara adalah:
 - a. UUD RI 1945;
 - b. Ketetapan-ketetapan MPR;
 - c. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 - d. Hukum tidak tertulis (i.c Hukum adat);
 - e. Putusan Desa;
 - f. Yurisprudensi;
 - g. Ilmu Pengetahuan;
 - h. Doktrin/ajaran para ahli.

Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya.² Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan sekalipun demikian ada pengecualiannya. Namun adapula putusan yang dapat dilaksanakan walaupun belum berkekuatan hukum tetap, yaitu jika suatu keputusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg. dapat pula dijelaskan disini, bahwa tidak semua keputusan yang

² R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.³

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.⁴ Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan *replik* dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun *duplik* dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan

³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 55.

⁴ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, h. 48.

perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.⁶

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.⁷

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1997), h. 122.

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.1.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 2.

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, undang-undang menyetralisir eksekusi di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya.

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat *condemnatoir* yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu pulalah permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Dalam praktik peradilan, ternyata upaya mengeksekusi putusan pengadilan tidak jarang menemukan hal-hal yang merumitkan ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang memerintahkan pelaksanaan eksekusi perdata. Karena hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang mendadak muncul. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang ketua pengadilan, dimana hukum eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan, kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan.⁸

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi. Pada penelitian ini juga peneliti akan mengkaji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.

⁸ Djazuli Bahar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1987), h. 72.

2. Deskripsi Fokus

Istilah "sosiologi" dicuatkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah seorang pendiri disiplin ilmu. Secara sederhana "sosiologi" berarti studi mengenai masyarakat, tetapi dalam prakteknya "sosiologi" berarti studi mengenai masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Baik Comte maupun Herbert Spencer (1820-1903), seorang pendiri lainnya, menekankan masyarakat sebagai unit dasar dari analisa sosiologis, sedang bermacam-macam pelembagaan (seperti keluarga dan lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan keagamaan) dan interrelasi antara lembaga-lembaga ini merupakan sub unit dari analisa. Maka dalam ikhtiar untuk memberikan penekanan pada konteks kemasyarakatan, para sosiolog modern dengan berbagai cara telah mendefinisikan sosiologi sebagai suatu "ilmu pengetahuan yang membahas kelompok-kelompok sosial"⁹ dan "studi mengenai interaksi-interaksi manusia dan interelasinya".¹⁰ Apa yang menjadi pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia baik yang individual maupun yang kolektif, namun lebih banyak segi kolektifnya dan relasinya dengan masyarakat.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.¹²

⁹ Hari M. Johnson, *Sociology: A Systematic Introduction* (London, 1961), h. 2.

¹⁰ Morris Ginsburg, *Sociology* (London, 1934), h.7.

¹¹ Michael Rush, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

¹² R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), h. 13.

Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum didalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan, bertujuan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dimana pernyataan tersebut menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak.

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk pelaksanaannya.

Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi atau dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah "*condemnatoir*" saja, artinya mengandung suatu "penghukuman". Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah "*deklaratoir*" dan "*constitutive*" tidak perlu eksekusi atau dilaksanakan, karena begitu putusan deklaratoir atau konstitutif diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *deklaratoir* mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan *konstitutif*, keadaan baru sudah tercipta pada titik itu pula.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui bagaimana syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi.
- b. Mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat dalam pelaksanaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan praktis, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat dari segi teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang perdata, disamping itu dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.

- b. Manfaat dari segi praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai input, kritik dan korektif, khususnya pada pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. *Kajian Pustaka*

Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Eksekusi Putusan, peneliti menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, buku yang berjudul “Hukum Acara Perdata” oleh M. Yahya Harahap. Buku ini membahas tentang tata cara beracara secara umum dalam lingkup keperdataan. Sedangkan pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai syarat eksekusi dalam kaitannya dengan penerapannya, dan berbagai landasan yuridisnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tidak dapat dieksekusi.

Kedua, buku yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” oleh M. Yahya Harahap. Buku ini membahas tentang eksekusi bidang perdata secara umum termasuk pengertian eksekusi, asas-asas eksekusi, beberapa masalah kasus eksekusi dengan kenyataan yang ada dalam praktek dengan menggunakan ilustrasi dan contoh-contoh kasus dalam beberapa pembahasan agar dapat terbangun logika dalam mencerna dan memahami segala persoalan dalam proses eksekusi yang secara karakteristik agak sedikit berbeda dengan proses eksekusi di lapangan.

Ketiga, buku yang berjudul “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata” oleh Mohammad Saleh. Buku ini mengulas lengkap bagaimana sebuah eksekusi terhadap putusan perkara perdata. Sedangkan pada penelitian ini akan dibahas apakah Asas ini sudah diterapkan pada lokasi penelitian tersebut.

Keempat, buku yang berjudul “Sosiologi Hukum” oleh Zainuddin Ali, dalam buku ini membahas tentang ruang lingkup yang berhubungan dengan tingkah laku atau praktik-praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai fakta-fakta hukum yang sering terjadi di lapangan ketika proses eksekusi berlangsung. Itu berarti secara otomatis peneliti harus secara langsung melakukan penelitian diinstitusi dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Putusan

Menurut bahasa, putusan adalah ketentuan, ketetapan atau keputusan.¹ Sedangkan menurut Sudikno Metrokusumo bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²

Selanjutnya batasan putusan dengan pengertian menurut syara', yakni keputusan adalah memisahkan sengketa gugat dan menyelesaikan atau memutuskan pertentangan.³ Lebih lanjut menurut beliau, bahwa didalam istilah bahasa Belanda dikenal dengan Vonnis adalah *gewijsde*. Vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa (*verzet*, *banding* dan *kasasi*). Sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga tersedia upaya hukum khusus (*peninjauan kembali* dan *perlawanan pihak ketiga*).

¹ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 784.

² Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Maju, 1993), h. 174.

³ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Agama* (Bogor: Al- Umoro, 1991), h. 178.

M. Nasir, dalam bukunya hukum acara perdata,⁴ menjelaskan bahwa putusan (*vonnis*) adalah bentuk penyelesaian perkara dalam peradilan *contentius*, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut dengan penetapan. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara yang dilakukan untuk memutuskan dan mengakhiri sengketa, sedangkan penetapan dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak, misalnya dalam pengangkatan wali, anak angkat dan lain-lain.

Dalam memutus perkara, hakim harus selalu bersikap sesuai yang diperintahkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 49 dan 44, bahwa Allah menyebut mereka yang memutuskan perkara dengan berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah swt. sebagai orang-orang yang kafir. Allah berfirman:

وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...”.

وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

⁴ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Cet: I, Bandung: Djambatan, 1989), h.172.

Terjemahannya:

“...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.⁵

Ayat-ayat diatas menjelaskan tanggung jawab yang berat para ulama rabbani dalam menjaga ajaran-ajaran samawi, serta tetap kukuh dalam menentang keinginan-keinginan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari masyarakat luas. Bahkan mereka diseru untuk memberantas kepincangan, khurafat dan penyelewengan-penyelewengan.

Sama halnya pada masa sekarang, para hakim dituntut untuk selalu memutuskan perkara secara adil seperti para ulama rabbani dizaman Rasulullah saw. dengan tidak mengedepankan hawa nafsu. Karena seseorang/hakim yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah biasanya karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah, orang semacam ini disebut kafir (Al-Maidah : 44).

Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik:

1. Para ulama hendaknya melihat segala permasalahan dengan pandangan yang bijaksana. Mereka tidak boleh takut dari ancaman apapun dalam rangka menjaga ajaran agama.
2. Dengan adanya aturan dan undang-undang dari langit, maka aturan manusia merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 91.

Khusus untuk pengadilan agama, dibedakan antara perkara permohonan dengan perkara gugatan. Permohonan diperiksa oleh pengadilan dan akhirnya dijatuhkan penetapan, sedangkan suatu gugatan diakhiri dengan putusan. Suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yakni dalam perkara yang dinamakan *yurisdiksi voluntair*, sedangkan suatu putusan diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa.

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada dua macam, yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan, yaitu putusan gugur, putusan *verstek* (tergugat tidak hadir) yang tidak diajukan *verzet* (perlawanan terhadap *verstek*), putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.⁶

Putusan akhir ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada yang bersifat menyatakan (*declaratoir*). Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Putusan *condemnatoir* ini memberikan hak

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 2.

kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan (eksekusi). Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan/menciptakan suatu keadaan hukum misalnya pengangkatan wali, pemberian pengampunan. Perubahan hubungan hukum itu terjadi saat putusan diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa (eksekusi). Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah dan tidak memerlukan upaya pemaksa (eksekusi).

2. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.⁷

Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis putusan sela yaitu:

a. Putusan *Prepatoir*

Putusan *prepatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan *prepatoir* adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri. Misalnya putusan

⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Cet. III; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h.57.

yang menetapkan bahwa gugat balik (gugatan dalam *rekonvensi*) tidak diputus bersama-sama dengan gugatan *konvensi* atau putusan yang menolak/menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat asli (*principal*) datang menghadap sendiri di persidangan.

b. Putusan *Interlukotoir*

Putusan *interlukotoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya putusan yang berisi perintah untuk memberikan keterangan ahli, putusan tentang beban pembuktian kepada salah satu pihak agar membuktikan suatu putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

c. Putusan *Insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan yang dijatuhkan hakim sehubungan adanya insiden, yang menurut sistem RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya ketika pemeriksaan sidang berlangsung salah satu pihak mohon agar saksinya didengar atau diperkenankan seorang pihak ketiga (*interventie*) masuk dalam perkara perdata tersebut dalam bentuk *voeging* (menyertai) atau *tussenkomst* (menengahi, vide: Pasal 79-8) dan bentuk lainnya adalah *vrijwaring*/garansi/penanggungan (vide:

Pasal 70-76 Rv), yang jika diuraikan, maka penjelasan dari ketiga bentuk putusan sebagai berikut:

- 1) *Voeging* adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dimana pihak ketiga tersebut memihak salah satu pihak, biasanya kepada pihak tergugat, untuk melindungi kepentingannya dari pihak ketiga itu sendiri.
- 2) *Tussenkomst* adalah pihak ketiga yang masuk dalam suatu perkara yang terjadi antara pihak penggugat dan tergugat dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak ketiga itu sendiri.
- 3) *Vrijwaring* adalah dimana salah satu pihak yang berperkara menarik pihak ketiga untuk ikut berperkara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang menariknya.

d. Putusan *Provisionil*

Putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan diatas tanah objek sengketa.⁸

⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, h.59.

Dilihat dari segi hadirnya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, ada tiga macam, yaitu:

1. Putusan Gugur

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/pemohonan gugur tidak hadir.⁹

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 77 Rv:

- a. Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud. Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkarannya penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu.
- b. Terhadap putusan pengguguran tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*, sifat putusannya :
 - 1) Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final in binding*,

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cet II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 2.

- 2) Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- c. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya:
- 1) Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru.
 - 2) Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

2. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi (pasal 149 Rbg), maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir atau *verstek*, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

3. Putusan *Kontrakditoir*

Putusan *kontrakditoir* ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan diucapkan dalam sidang tidak hadir salah satu pihak atau para pihak-pihak yang tidak hadir dianggap tidak sungguh-sungguh lagi membela kepentingannya dalam perkara

yang bersangkutan. Dan dianggap sudah rela menerima, apa saja yang dikemukakan oleh lawan.¹⁰

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan dipersidangan, bertujuan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dimana pernyataan tersebut menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak.

B. Syarat-syarat Putusan

Pembahasan yang diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

¹⁰ M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 343.

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan,
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.¹¹

Sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 105 yang menyuruh agar senantiasa bersikap adil:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ
خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan hak, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah perlihatkan kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena para pengkhianat, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 797.

Ayat ini kembali kepada persoalan semula yang berbicara tentang orang-orang munafik, yang diselingi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan mereka, sampai pada uraian tentang kewajiban menindak tegas, bahkan memerangi mereka yang terang-terangan keluar dari Islam, hingga ancaman bagi mereka yang berdalih tertindas karena enggan berhijrah dan berjihad.¹²

Al-Biqā'i juga menilai ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya sebagai awal dari satu kelompok ayat dan kelanjutan dari uraian yang lalu. Menurutya, uraian kelompok ayat ini menggambarkan keanehan orang-orang yang telah diberi kita suci, yang sesat dan menyesatkan orang lain, lalu uraian yang tidak kurang anehnya yaitu keimanan mereka kepada *al-jibt*, setan dan berhala, dilanjutkan dengan uraian tentang anehnya sikap mereka yang mengaku percaya kepada kitab yang diturunkan Allah tetapi mencari hakim selain-Nya. Ini dilanjutkan dengan aneka rincian menyangkut mereka, serta aneka dalil yang membatalkan dalih mereka, sampai akhirnya perintah untuk menghadapi para pembangkang dengan keampuhan argumen dan kekuatan senjata, yang ditutup dengan dua sifat Allah Yang Maha Sempurna, yaitu *Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*. Dari sini, lanjut al-Biqā'i sungguh tepat menjelaskan pada ayat yang menyusulnya bahwa dia yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana itu telah menurunkan kitab suci sambil menjelaskan fungsinya yang ditolak oleh para pembangkang yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang lalu. Karena itu, tulis al-biqā'i, ayat ini menegaskan bahwa: *Sesungguhnya Kami* yakni Allah melalui

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, Vol 2), h. 548.

malaikat Jibril, *telah menurunkan kepadamu* wahai Muhammad secara khusus satu kitab yang amat sempurna mengandung tuntutan yang sesuai dan disertai dengan *hak* dalam segala aspeknya *supaya engkau mengadili antara manusia* siapapun mereka dengan apa yang telah Allah wahyukan, yakni melalui apa yang *telah Allah perlihatkan kepadamu* dan atau ilhamkan dan tunjukkan pendapat melalui nalarmu, baik yang telah engkau terima maupun yang pasti bakal engkau terima *dan janganlah engkau menjadi penantang* orang yang tidak bersalah, *karena membela para pengkhianat.*

Karena terlintas dalam benak Nabi saw. Niat untuk membela orang-orang yang khianat walau akibat ketidaktahuan dan sangka baik beliau kepada sesama muslim, maka dengan ayat ini Allah memerintahkan; *mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini dan masa datang *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam konteks hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, asy-Sya'rawi mengemukakan bahwa setelah Allah swt menguraikan tentang perjuangan membela agama-Nya, Allah menuntun orang-orang mukmin guna lebih mensucikan gerak kehidupan. Allah Yang Maha Mengetahui berpesan kepada orang-orang mukmin bahwa konsekuensi keberadaan dibawah panji-panji Islam mengandung kewajiban-kewajiban. Jangan menduga bahwa kalian memperoleh keistimewaan yang membedakan kalian dari orang lain dalam hal keadilan. Sebagaimana Allah memerintahkan kalian untuk berjuang menegakkan keadilan terhadap orang-orang kafir dan munafik, maka perjuangan tersebut harus juga kalian tegakkan atas orang-

orang dari kalangan kalian yang mengaku beriman. Jangan duga, bahwa dengan pengakuan keislaman dan keimanan kalian telah berbeda dengan yang lain dan kalian telah memiliki kekebalan hukum. Tidak! *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan hak, supaya engkau mengadili antara manusia.*¹³

Ayat diatas sangat jelas diperuntukkan kepada hakim untuk selalu bersikap adil dan membela orang-orang yang benar dalam memutus suatu perkara dengan berpedoman/merujuk kepada Al-Qur'an serta perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Ditegaskan pula didalamnya larangan membela orang-orang yang bersalah/orang-orang yang khianat. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sumber hukum paling lengkap yang didalamnya memuat segala sesuatu yang tidak ketahui oleh manusia.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.¹⁴

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 549.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 798.

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun halite dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

4. Diucapkan di Muka Umum

a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*.¹⁵¹⁵ Dalam literature disebut *the pen*

¹⁵ Frances Russell dan Christine Loche, *English Law and Languange* (London: Cassel, 1992), h. 30.

justice principle. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.¹⁶

b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Mengenai prinsip ini, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 huruf c UU No. 14 Tahun 1970: diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

1. Tidak sah, atau
2. Tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁶ Geoffrey Robertson QC, *Freedom, the Individual and the Law* (New York: Penguin Book, 1993), h. 341.

c. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian.

d. Diucapkan di dalam Sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.¹⁷

e. Radio dan Televisi Dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat demokrasi, setiap warga Negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ Negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan Negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana *judicial power*, tidak boleh tertutup,

¹⁷ Tanggal 23 November 1974, Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997, MA RI, Februari 1999, h. 298.

tetapi harus terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga Negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang mutlak harus dalam suatu putusan hakim, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian putusan, yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan tersebut memberi kekuatan eksekusi pada putusan. Apabila kepala putusan tersebut tidak dibutuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusannya.

2. Identitas Para Pihak

Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu perkara atau sengketa, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Maka dari itu dalam suatu putusan haruslah memuat pula identitas dari para pihak yang telah bersengketa, seperti nama, umur, alamat, dan nama dari kuasa hukum masing-masing pihak jika ia menggunakan.

3. Pertimbangan hakim

Pada bagian pertimbangan hakim dalam suatu putusan perkara perdata, memuat didalamnya tentang pertimbangan mengenai duduknya perkara yang

¹⁸ Richard Stone, *Textbook on Civil Liberty* (London: Blackstone, 1994), h. 171.

disengketakan atau peristiwanya, dan pertimbangan tentang hukumnya.

Pasal 184 HIR mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, Pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan.

4. Amar Putusan

Amar atau *dictum* merupakan tanggapan/jawaban terhadap petitum. Amar putusan hakim dalam perkara perdata dikenal juga dengan istilah dictum putusan, yang memuat tanggapan hakim terhadap petitum atau tuntutan para pihak dalam sengketa yang diperiksa oleh hakim.

Pasal 178 ayat (1) HIR mengharuskan hakim didalam mempertimbangkan putusan yang akan diambil untuk mencukupi segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Ini memang sudah semestinya berhubungan dengan tugasnya hakim untuk menentukan atas jabatannya, hukum yang akan menguasai soal yang menjadi perkara.¹⁹

¹⁹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Pradigma Paramita, 2002), h. 85.

C. Putusan Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial (*Executoriale Kracht*) adalah putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkankan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa oleh alat-alat negara. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang yang membantahnya.

Kekuatan mengikat saja belum cukup bila tidak direalisir. Oleh karena itu, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap juga dapat dilaksanakan, jika perlu dengan upaya paksa.

Kekuatan eksekutorial berarti kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa, dengan bantuan alat-alat Negara (Polri), kekuatan eksekutorial pada dasarnya tak dapat dilumpuhkan atau dibatalkan, kecuali telah dilaksanakan secara sukarela (*vrijillig*) apa yang tercantum dalam amar putusan (*dictum*) dengan kerelaan tanpa paksaan.

Syarat kekuatan eksekutorial ternyata dari kepala atau judul (*irah-irah*) dari putusan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 Th. 1999.

Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dilaksanakan secara paksa, sedang yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak perlu sarana dan upaya paksa, karena tidak memuat hak-hak atas suatu prestasi tertentu.²⁰

Jenis-jenis eksekusi:

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang; Pasal 196 HIR / 208 RBg;
2. Eksekusi untuk menghukum agar melakukan suatu perbuatan : Pasal 225 HIR/259 RBg; kalau tidak mungkin, dinilai dengan uang;
3. Eksekusi riil yaitu eksekusi yang dilaksanakan secara nyata (*riil*) misalnya eksekusi pengosongan rumah/tanah, dan penjualan lelang barang-barang tetap atau tidak tetap milik tergugat yang kalah.
4. Parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dalam hal kreditor menjual barang-barang tertentu milik debitor tanpa mempunyai title eksekutorial, misalnya dalam soal-soal pajak.

Putusan hakim yang telah mempunyai atas hak (*title*) eksekutorial, demi hukum otomatis menjadi sita eksekutorial. Sedangkan putusan itu maksudnya menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya. Lain dari itu juga realisasinya/pelaksanaan/eksekusinya dilaksanakan secara paksa.²¹

²⁰ R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 195.

²¹ R. Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, h. 153.

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi

Alasan-alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau noneksekutabel. Dalam uraian ini akan diinventarisasi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar noneksekutabel yang diambil dari pengamatan praktik, dan telah menjadi patokan dalam menghadapi kasus-kasus noneksekutabel.

1. Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak Ada

Kalau secara nyata tidak dijumpai harta tereksekusi dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, sudah barang tentu eksekusi tidak dapat dijalankan. Begitu pula dalam eksekusi riil, kalau barang yang hendak dieksekusi tidak ada lagi, baik karena hancur atau berpindah secara sah dengan alas hak yang sah, tidak mungkin eksekusi riil dapat dijalankan.

Pengertian mengenai harta kekayaan tereksekusi tidak ada, harus ditafsirkan secara luas. Tidak boleh ditafsirkan secara sempit. Oleh karena itu, yang termasuk dalam jangkauan pengertian mengenai harta tereksekusi tidak ada lagi, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Mutlak Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak Ada

Pada kasus ini sama sekali harta kekayaan tereksekusi benar-benar tidak ada lagi, dalam arti harta kekayaannya sudah habis. Habisnya harta kekayaan tereksekusi bisa terjadi disebabkan:

- 1) Telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan; atau
- 2) Oleh karena bencana alam berupa kebakaran, banjir, dan sebagainya.

Dalam hal yang seperti ini, secara nyata eksekusi tidak mungkin dijalankan, sebab barang yang akan dijadikan objek eksekusi tidak ada. Oleh karena itu, dalam kasus yang demikian, eksekusi harus dinyatakan noneksekutabel (tidak dapat dijalankan) atas alasan barang tereksekusi tidak ada.²²

²² M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 335.

b. Pada Saat Eksekusi Dijalankan, Pemohon Eksekusi Tidak Mampu Menunjuk Harta Kekayaan Tereksekusi

Penafsiran kedua tentang pengertian tidak adanya harta kekayaan tereksekusi termasuk tentang ketidakmampuan pemohon eksekusi menunjukkan dimana dan apa barang yang hendak dieksekusi. Dalam kasus ini belum pasti ada atau tidak ada harta tereksekusi. Namun, pemohon eksekusi tidak mampu atau tidak berhasil menunjukkan dimana dan apa saja barang kekayaan tereksekusi. Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pemohon eksekusi, harus mampu menunjukkan harta kekayaan tereksekusi yang akan menjadi objek eksekusi. Selama pemohon tidak berhasil menunjuk barang tereksekusi, baik secara fisik maupun berdasarkan identitas dan lokasi barang, eksekusi tidak dapat dijalankan, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menyatakan permintaan eksekusi noneksekutabel.²³

c. Barang yang Ditunjukkan Tidak Ditemukan

Pemohon eksekusi menunjuk suatu barang yang hendak dijadikan objek eksekusi. Akan tetapi pada saat eksekusi dijalankan, juru sita tidak menemukan secara jelas barang yang ditunjuk. Dalam kasus yang demikian, eksekusi tidak dapat

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 336.

dijalankan, atas alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ada” atau barang yang hendak dieksekusi “tidak ditemukan”.

2. Putusan Bersifat Deklarator

Salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat “*condemnatoir*”, yakni amar putusan berisi “penghukuman” kepada pihak tergugat. Umumnya amar yang bersifat *condemnatoir* terdapat dalam perkara “*contentiosa*”, yaitu perkara sengketa antara dua pihak dimana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat. Namun, dengan tidak mengurangi apa yang dikemukakan secara umum tersebut, sering juga dijumpai putusan yang bersifat deklarator dalam perkara *contentiosa*. Dalam kasus yang demikian, apabila perkara *contentiosa* hanya memuat amar yang bersifat deklarator, eksekusi terhadap putusan tersebut harus dinyatakan *non eksekutabel*. Misalnya, amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah terperkara kepada penggugat. Amar yang seperti itu hanya bersifat deklarator, bukan *condemnator*. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*).²⁴

²⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 337.

Adapun ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan dianggap bersifat kondemnator:

- a) Didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban;
- b) Pernyataan tersebut langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat; dan
- c) Amar penghukuman yang membarengi pernyataan bisa berupa:
 - 1) Menghukum tergugat untuk menyerahkan;
 - 2) Menghukum tergugat untuk mengosongkan;
 - 3) Menghukum tergugat untuk membongkar;
 - 4) Menghukum tergugat untuk “melakukan sesuatu”; dan
 - 5) Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang (baik berupa utang atau ganti rugi).

Inilah ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan bersifat kondemnator. Hanya putusan yang memuat salah satu ciri di atas yang dapat dieksekusi. Kalau salah satu ciri ini tidak tercantum dalam amar putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat deklaratif. Putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel).²⁵

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 338.

3. Barang Objek Eksekusi ditangan Pihak Ketiga

Dengan tidak mengurangi penjelasan yang berkenaan dengan amar putusan dan eksekusi dapat menjangkau (meliputi) barang yang ada pada pihak yang tidak ikut digugat, pada prinsipnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila barang objek eksekusi sudah berpindah kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tidak ikut digugat. Namun, prinsip ini tidak terlepas dari faktor:

- a) Keabsahan alas hak yang diperoleh pihak ketiga atas barang yang bersangkutan, dan
- b) Adanya amar yang mencantumkan penghukuman siapa saja yang mendapatkan hak dari tergugat.

4. Eksekusi Terhadap Penyewa, Noneksekutabel

Eksekusi terhadap penyewa yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi berdasarkan alas hak yang sah pada satu segi, dan sekaligus pula berhadapan dengan asas yang diatur dalam Pasal 1576 KUH Perdata yang menentukan “jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa” (*koop breekt geen huur, lease goes before sale*).

Sekiranya eksekusi tetap juga hendak dijalankan kepada penyewa, penyewa dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan. Perlawanan

dimaksudkan untuk membela dan mempertahankan kedudukannya sebagai penyewa.²⁶

5. Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya

Faktor berikutnya yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah pada waktu pengadilan meletakkan sita eksekusi atau melaksanakan eksekusi terhadap eksekusi riil atau pengosongan tempat yang dikuasai oleh termohon eksekusi, pemohon eksekusi kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, yang berakibat eksekusi tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel).

6. Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara

Apabila eksekusi berhadapan dengan perubahan status tanah, dalam arti tanah sengketa yang menjadi objek eksekusi beralih menjadi tanah Negara pada saat eksekusi hendak dijalankan, dalam kasus yang demikian cukup alasan untuk menyatakan eksekusi noneksekutabel.

7. Barang Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri

Pada prinsipnya eksekusi terhadap barang yang berada diluar negeri dinyatakan noneksekutabel. Menurut asas peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang dijatuhkan pengadilan Indonesia hanya berlaku dan berdaya eksekusi diwilayah Indonesia dan oleh karena itu tidak mempunyai daya eksekusi diluar negeri.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 346.

8. Adanya dua putusan yang saling bertentangan terhadap objek yang sama

Jika pengadilan negeri berhadapan dengan eksekusi atas dua putusan yang saling bertentangan, yang dapat dijadikan alasan noneksekutabel ialah fakta tentang adanya saling pertentangan antara dua putusan yang bersangkutan dan tidak tepat atas alasan *ne bis in idem*. Cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus putusan yang saling bertentangan adalah melalui upaya peninjauan kembali dan melalui perdamaian. Kalau kedua hal itu tidak dilakukan maka putusan itu tidak bernilai apa-apa tak ubahnya seperti kertas sampah.

9. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama

Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersama yang masih utuh sebagai pembayar kepentingan rumah tangga. Putusan MA tanggal 20-11-1975 No. 306K/sip/1973: “Semua utang yang dibuat salah satu pihak selama dalam perkawinan harus diperhitungkan dari barang-barang gono-gini”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Sukanto, menyatakan bahwa : “Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistimatis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya”.¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan. Penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan atau dimasyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena selama ini masih banyak putusan yang bersifat menghukum yang tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 3.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris (Pendekatan Sosiologi Hukum) yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi dimasyarakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).² Dalam hal ini Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu hakim, juru sita dan ketua panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi

² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.³ Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lokasi yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa.

3. Angket

Angket adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk dijawab oleh informan. Angket merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam hal ini peneliti membuat pertanyaan secara tertulis kepada warga masyarakat kabupaten Gowa yang pernah terlibat dalam kasus eksekusi.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian lapangan, instrumen atau alat penelitian yang digunakan yaitu:

1. Daftar Pertanyaan Angket
2. Alat Rekam Audio Visual
3. Alat Tulis-Menulis

³ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186.

E. Sumber Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, penulis golongan dalam:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus putusan eksekusi. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak mempunyai keterkaitan dalam kasus putusan eksekusi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam bentuk buku, jurnal, majalah.⁴ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.

2. Sampel

Bertolak dari populasi tersebut, peneliti akan menarik 7 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang warga masyarakat Gowa
- b. 3 (tiga) Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
- c. Kepala Panitera
- d. Juru Sita

G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵ Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian

⁵ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 46.

disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

H. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam dengan cara sistematis.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara dan angket yang telah ditemukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Putusan Yang Dapat Dieksekusi

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenaan dengan eksekusi putusan. Berdasarkan penelitian penulis di pengadilan negeri tersebut, telah diperoleh data bahwa selama kurun waktu 4 tahun (2013-2016) jumlah kasus perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu sebanyak 246 perkara.

Untuk lebih jelasnya tentang syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi, terlebih dahulu sebagai gambaran keadaan perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
JUMLAH PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
SUNGGUMINASA
TAHUN 2013-2016

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2013	64 Perkara
2014	60 Perkara
2015	57 Perkara
2016	65 Perkara

Sumber data : Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, 2017.

Pada tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2013 dengan jumlah perkara sebanyak 64 perkara, pada tahun 2014 sebanyak 60 perkara, pada tahun 2015 sebanyak 57 perkara, sedangkan tahun 2016 sebanyak 65 perkara.

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata perkara yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu 4 tahun (tahun 2013-2016) adalah sebanyak $246 : 4 = 62$ perkara. Dari banyaknya perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa mulai tahun 2013 sampai tahun 2016 menurut penulis tidak menjadi beban bagi para hakim dalam mengadili dan menyelesaikan semua perkara tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

TABEL 2
Jumlah Perkara Diterima dan Diputus Pengadilan Negeri Sungguminasa
Tahun 2013-2016

Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa
2013	64	47	17
2014	60	45	15
2015	57	57	0
2016	65	28	37
Jumlah	246	177	69

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2017.

Data pada tabel 2 tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 dari 64 perkara yang diterima 47 kasus telah diputus. Pada tahun 2014, dari 60 perkara yang diterima 45 kasus telah diputus. Pada tahun 2015, dari 57 perkara yang diterima maka semuanya telah diputus atau diselesaikan pada tahun 2015 tersebut. Pada tahun 2016,

dari 65 perkara yang diterima hanya 28 kasus yang telah berhasil diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah kasus yang diterima sebanyak 246 kasus, yang telah diputus sebanyak 177 kasus dan sisanya sebanyak 69 kasus.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenaan dengan syarat-syarat putusan yang dapat dieksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diwakili oleh Amiruddin Mahmud pada tanggal 17 Mei 2017, dikatakan bahwa :

Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi maksudnya adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Dan hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* atau yang bersifat menghukum yang dapat dieksekusi karna telah melekat kekuatan eksekutorial yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.¹

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, putusan

¹ Amiruddin Mahmud (34 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

pengadilan tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi dan putusan mahkamah agung dalam hal kasasi.²

Ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir, dalam amar atau dictum putusan terhadap perintah yang menghukum pihak yang kalah yang dirumuskan dalam kalimat:

1. Menghukum atau memerintahkan “Menyerahkan” suatu barang.
2. Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan “Melakukan” suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum atau memerintahkan “Penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan “Pembayaran” sejumlah uang.

Kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnatoir ialah putusan yang bersifat deklaratoir (*deklaratoir vonnis*). Dalam putusan yang bersifat deklaratoir, amar atau *dictum* putusan hanya mengandung pernyataan hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Jadi tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.

² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* (Buku II, Cet. Ke 4 : 2002), h.149.

Selanjutnya Amiruddin Mahmud juga menyatakan bahwa :

Putusan eksekusi tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan oleh penggugat untuk mendapatkan penyelesaian. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius Curia Novit*). Tugas hakim memberikan putusan setelah pemeriksaan selesai.³

Untuk mengakhiri suatu sengketa, hakim terlebih dahulu harus mengetahui tentang duduk perkaranya, kemudian hakim menentukan peraturan hukum apa yang menguasai sengketa itu. Hakim harus menemukan hukumnya.

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, namun dengan dijatuhkannya putusan saja persoalannya belum selesai. Putusan itu harus dilaksanakan. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara. Kekuatan eksekutorial tersebut diberikan oleh Kepala Putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karenanya jika ada putusan tidak mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak yang dikalahkan secara sukarela melaksanakan amar putusan, maka selesailah perkara tersebut tanpa bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

³ Amiruddin Mahmud (34 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 17 Mei 2017.

Namun dalam perkara yang diputus dengan adanya pihak yang kalah, maka sangat jarang sekali pihak yang kalah tersebut akan dengan sukarela mau melaksanakan bunyi putusan tersebut. Dalam hal yang demikian pihak yang menang harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan bunyi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.

Pada umumnya jenis perkara yang pernah masuk pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang putusannya dilakukan secara sukarela adalah perkara yang nilai objeknya kecil. Menurut penulis hal tersebut sangat logis dan memang sudah sepatutnya demikian, karena apabila perkara yang obyeknya kecil tersebut diselesaikan dengan jalan eksekusi, maka tidak akan mencukupi untuk membayar biaya eksekusi. Oleh karena itu penyelesaiannya adalah dengan jalan sukarela.

Mengenai hal ini selanjutnya Abdul Latief⁴ menjelaskan bahwa :

Untuk melaksanakan suatu putusan perkara perdata, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah permohonan itu diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata putusan perkara perdata yang dimohonkan itu bersifat kondemnatoir (bukan deklaratoir dan juga bukan konstitutif) maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan kepada pemohon eksekusi dibebani untuk membayar *Voorschot*/ biaya eksekusi.

Apabila ketua pengadilan negeri menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat yang menang perkara (pemohon eksekusi), tindakan pelayanan hukum yang harus segera dilaksanakan memenuhi permohonan tersebut yaitu memanggil

⁴ Abdul Latief (41 Tahun), Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 17 Mei 2017.

pihak tergugat (termohon eksekusi) dan memperingatkan (menegur/*aanmaning*) supaya memenuhi/menjalankan putusan.

Selanjutnya Amiruddin Mahmud menambahkan bahwa:

Teguran atau *aanmaning* merupakan salah satu syarat eksekusi. Tanpa peneguran lebih dahulu, maka eksekusi tidak boleh dijalankan. Dan seperti yang sudah dijelaskan, berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peneguran dilampaui.

Pada saat sidang memberi peringatan, Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu kepada termohon eksekusi, agar dalam batas waktu itu putusan dijalankan. Batas waktu masa peringatan dalam waktu delapan hari. Sebagaimana dalam Pasal 196 HIR:

Apabila termohon eksekusi tidak hadir berdasar alasan yang patut maka harus dilakukan panggilan ulang. Tetapi apabila termohon eksekusi tidak hadir tanpa alasan yang sah maka menurut Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 201 ayat (1) RBG pihak yang tidak memenuhi panggilan peringatan tersebut tidak diperlukan proses sidang peringatan dan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah *eksekutorial beslaag* dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jadi eksekusi langsung diperintahkan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan. Apabila masa peringatan telah dilampaui dan termohon eksekusi tidak mau menjalankan pemenuhan isi putusan, maka dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pelayanan

hukum yang dikehendaki oleh Pasal 197 (1) HIR dan tidak perlu ditunda-tunda tanpa alasan.

Surat perintah eksekusi berupa surat penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi perintah menjalankan eksekusi kepada panitera atau jurusita. Menjalankan eksekusi *riil* merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam *dictum* putusan, misalnya menghukum tergugat mengosongkan tanah terperkara.

Disamping surat penetapan berisi perintah menjalankan eksekusi, surat penetapan itu sendiri berisi penunjukan nama pejabat yang diperintahkan. Jika yang ditunjuk itu panitera, harus disebut jabatan dan namanya. Demikian juga, jika yang ditunjuk menjalankan eksekusi jurusita, harus disebut jabatan dan namanya dalam surat penetapan.

Sebagaimana dalam Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 55 UU tersebut juga menyebutkan:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut hal ini dijelaskan pula dalam Pasal (1) HIR menyebutkan: Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Dari Pasal ini ditegaskan bahwa:

1. Yang berwenang melaksanakan putusan/eksekusi adalah di pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut. Jadi pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak mempunyai wewenang melaksanakan putusan/eksekusi. Pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri kecuali bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terjadi penyimpangan dengan memberi petunjuk, pengarahan dan teguran. Kewenangan pengadilan negeri sebagai pelaksana eksekusi tidak berarti sebagai tindakan yang bebas/lepas kendali dari pengawasan peradilan yang lebih tinggi.

2. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa/memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Yang diperintah untuk menjalankan eksekusi adalah panitera dan jurusita. Perintah tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan yang merupakan landasan yuridis tindakan yang dilakukan oleh panitera dan jurusita. Namun demikian ketua pengadilan tetap bertanggung jawab atas eksekusi karena dia yang memimpin eksekusi. Jadi apabila terdapat penyimpangan dalam eksekusi ketua pengadilan negeri tetap bertanggung jawab mulai sejak memerintahkan/mengeluarkan surat penetapan eksekusi, sita eksekusi, pelelangan, pengosongan, penyerahan barang pada pembeli lelang, penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

Didalam menjalankan eksekusi riil ini dilaksanakan oleh panitera atau jurusita yang disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini merupakan syarat formal dalam menjalankan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau 211 ayat (2) RBg. Oleh karena itu, pelaku putusan tentang eksekusi riil yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi, menurut hukum tidak memenuhi syarat atau eksekusi riil tersebut dianggap tidak sah. Adanya kedua orang saksi ini merupakan syarat formal dalam melaksanakan eksekusi riil dimana saksi-saksi ini berkedudukan dan berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus menjadi saksi jalannya eksekusi. Mereka memberi

penyaksian atas jalannya pelaksanaan eksekusi riil yang dilakukan oleh panitera dan jurusita.

Dalam eksekusi pembayaran uang, apabila masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran uang tersebut, maka ketua pengadilan negeri melakukan sita eksekusi harta kekayaan termohon eksekusi, setelah dilakukan sita eksekusi harus lagi disusul dengan pentahapan proses surat perintah penjualan lelang. Selanjutnya disusul proses pentahapan penjualan lelang itu sendiri oleh kantor lelang pembayaran jumlah uang itu nanti dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang. Dari hasil penjualan lelang barang yang disita tadi pembayaran baru dapat dilakukan.

Sekiranya dalam setiap tahapan eksekusi tersebut, baik dalam eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang, jika tidak ada alasan yang kuat, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak perlu menunda-nunda jalannya eksekusi tersebut.

Setelah seluruh prosedur yang penulis uraikan sebelumnya dilalui, maka barulah eksekusi dapat dijalankan. Lebih lanjut Abdul Latief menjelaskan bahwa :

Dalam setiap melaksanakan eksekusi, selalu disertai dengan pembuatan berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi tersebut adalah merupakan bukti bahwa eksekusi itu telah dijalankan sebagaimana mestinya karna memuat segala peristiwa yang terjadi selama proses eksekusi dijalankan.⁵

⁵ Abdul Latief (41 Tahun), Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

Menurut penulis, pembuatan berita acara eksekusi dalam setiap pelaksanaan eksekusi merupakan sesuatu yang sifatnya sangat mutlak, karena berita acara tersebut merupakan satu-satunya rujukan otentik tentang benar tidaknya ataupun tentang lancar atau tidaknya eksekusi tersebut. Segala kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada saat eksekusi dicatat dalam berita acara eksekusi.

Sebagai bukti pelaksanaan eksekusi riil tersebut maka dalam berita acara tersebut harus terinci tentang :

1. Tanah yang disita dan dikosongkan
2. Jenis barang yang akan dieksekusi
3. Hari, tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya eksekusi
4. Hadir atau tidaknya tereksekusi
5. Letak/tempat tanah yang akan dieksekusi (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa)
6. Tanda tangan dua orang saksi.

Mengenai pelaksanaan eksekusi di lapangan, sebelumnya panitera selaku pejabat yang memimpin jalannya eksekusi dihadapan para pihak yang bersengketa dan pejabat desa di daerah yang bersangkutan memberitahukan tentang pelaksanaan eksekusi fisik tersebut akan dilangsungkan.

Selanjutnya Abdul Latief, menyatakan bahwa setelah eksekusi selesai dilaksanakan, panitera melaporkan hasil eksekusi tersebut kepada ketua pengadilan negeri sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Secara lisan dan laporan tertulisnya menyusul bersama-sama dengan laporan kantor yang lain, yang dilakukan empat bulan sekali.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi

Terkhusus pada putusan eksekusi, penulis telah memperoleh data selama dua (2) tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2016 yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
Jumlah Putusan Eksekusi Pengadilan Negeri Sungguminasa yang
Terlaksana dan Tidak Terlaksana
Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Putusan Eksekusi	Terlaksana	Tidak Terlaksana
2015	14 Perkara	5 Perkara	9 Perkara
2016	13 Perkara	3 Perkara	10 Perkara
Jumlah	27 Perkara	8 Perkara	19 Perkara

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2017.

Data pada tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2015, dari 14 perkara yang dijatuhi putusan eksekusi hanya 5 perkara yang berhasil terlaksana. Sedangkan pada tahun 2016, dari 13 perkara yang dijatuhi putusan eksekusi hanya 3 perkara yang berhasil terlaksana. Dari tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas tingginya

jumlah putusan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tidak dapat terlaksana.

Pada prinsipnya putusan yang bersifat *condemnatoir* bisa dilakukan eksekusi oleh juru sita dari pengadilan negeri tempat perkara itu diperiksa dan diputus. Namun dalam hal-hal tertentu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir* tersebut dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) karena beberapa alasan khusus. Berikut alasan-alasan hukum dan fakta yang diuraikan oleh Amiruddin Mahmud yang menjelaskan banyaknya putusan yang tidak terlaksana di Pengadilan Negeri Sungguminasa :

Putusan eksekusi yang tidak terlaksana diatas hampir semuanya disebabkan karena putusan tersebut dinyatakan oleh Ketua Pengadilan adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel. Ada berbagai macam putusan noneksekutabel yang dihadapi Pengadilan Negeri Sungguminasa dan yang paling sering ditemui yaitu pada eksekusi riil (tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya) dan barang objek eksekusi berada ditangan pihak ketiga yang tidak ikut digugat.⁶

Penetapan non eksekutabel harus didasarkan pada Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. Jadi ketua pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel sebelum seluruh proses atau acara eksekusi dilaksanakan.

⁶ Amiruddin Mahmud (34 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 17 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf,⁷ juga menjelaskan lebih lanjut hambatan yang sering dijumpainya di lapangan menyatakan bahwa:

Pengadilan negeri sebagai pengembang tanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi, seringkali mengalami hambatan yang disebabkan oleh pihak yang kalah tidak mau meninggalkan objek sengketa dengan mengerahkan massa, disertai pula karena kelemahan dan kekurangan aparat yang terlibat.

Keengganan pihak yang kalah untuk melaksanakan dengan sukarela objek sengketa akan mengakibatkan eksekusi tertunda sehingga menimbulkan rasa tidak puas dari pencari keadilan. Keluhan-keluhan maupun rasa tidak puas tersebut sering disampaikan pada Ketua Mahkamah Agung. Dari surat-surat yang masuk ke sekretariat Mahkamah Agung dalam kurun waktu Juli 2003 sampai Agustus 2004 tentang penundaan pelaksanaan eksekusi ini berjumlah 826 buah surat dari seluruh Indonesia dan 4137 pengaduan dan permohonan perlindungan hukum.⁸

Bahwa faktanya ketika penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang sarannya adalah warga yang pernah terlibat sengketa di Pengadilan Negeri Sungguminasa, tak jarang masyarakat atau pihak yang pernah terlibat eksekusi menyatakan bahwa dalam memutus perkara pengadilan hanya membela yang bayar. Dan pemikiran itu bisa penulis katakan bahwa pemikiran yang sudah melekat kuat dalam otak mereka. Karenanya hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan sering

⁷ Muhammad Yusuf (39 Tahun), Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Laporan Kegiatan Mahkamah Agung 2003-2004*, Jakarta 2004, h. 36.

dihadapkan pada permasalahan yang muncul sehingga menghambat kelancaran jalannya eksekusi.

Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya eksekusi itu antara lain sebagai berikut:

1. Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon

Besarnya biaya tergantung kepada perbuatan eksekusi apa yang akan dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencar tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan memerlukan biaya yang cukup banyak. Otomatis jika biaya belum terpenuhi oleh pemohon maka eksekusi belum bisa jalan. Lain halnya kalau eksekusi perkara pidana tidak diperlukan biaya-biaya seperti dalam eksekusi perkara perdata.

Muhammad Yusuf⁹ menyatakan bahwa:

Jika tereksekusi tidak mau memenuhi amar putusan secara sukarela maka untuk melaksanakan eksekusi itu diperlukan biaya eksekusi. Biaya eksekusi ini merupakan kelanjutan dari biaya pemeriksaan di persidangan karena menurut hemat saya penyelesaian perkara sampai putusan perkara dieksekusi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

⁹ Muhammad Yusuf (41 tahun), Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

Seperti contoh kasus eksekusi tanah di Tombolo Pao, Abdul Latief menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan disana hampir tidak terlaksana disebabkan karena awalnya pemohon eksekusi tidak bersedia untuk membayar biaya pelaksanaan eksekusi.

Adakalanya dalam kasus-kasus eksekusi tertentu diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi cukup besar misalnya untuk pengosongan tanah yang luas dan dihuni oleh banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat yang pernah terlibat eksekusi di daerah Kecamatan Pallangga menyatakan bahwa:

Awalnya saya merasa senang karna perkara yang saya ajukan ke pengadilan akhirnya diputus bahwa saya menang tetapi setelah diberi tahu oleh pihak pengadilan bahwa ada biaya yang harus dibayarkan supaya eksekusi dapat dijalankan maka saya langsung kecewa lantaran saya tidak bisa mendapatkan hak saya karna terhambat oleh biaya eksekusi.¹⁰

Dijelaskan pula bahwa pembayaran biaya eksekusi harus lebih dulu dibayar oleh pemohon eksekusi. Selama belum dibayar, eksekusi tidak dapat dijalankan. Hal ini sebagai hasil analog dari ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR dimana selama Penggugat belum membayar panjar perkara maka tidak dicatat dalam buku register perkara.

¹⁰ Hamdana (31 Tahun), Warga Ritaya Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Wawancara, 20 Mei 2017.

2. Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga

Pada dasarnya adanya perlawanan dari pihak ketiga tidaklah menangguhkan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik [Pasal 196 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) R.Bg], atau atas dasar pemegang hipotik/pemegang hak tanggungan yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan. Apabila perlawanan tersebut menurut ketua pengadilan (sebelum perkara ditetapkan majelis hakimnya) beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 208 HIR/228 R.Bg), maka eksekusi ditangguhkan, dan sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak, maka eksekusi dilanjutkan.

Bagi termohon eksekusi, setelah adanya teguran (*aanmaning*) diterima, jika tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak memenuhi bunyi putusan maka eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itulah biasanya perlawanan diajukan lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya lewat surat kabar atau pada waktu pelaksanaan di lapangan, maka pihak ketiga akan mengajukan *verzet* setelah ada perlawanan.

Jadi alasan yang diajukan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan berita acara eksekusi itu haruslah karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak yang berperkara terhadap dirinya. Sehingga perlu untuk juga melindungi hak bagi pihak ketiga tersebut. Jadi pihak ketiga sebagai si pemohon untuk melawan

putusan hakim tersebut diterima, maka hakim akan melakukan pemeriksaan dan meneliti kembali putusan yang dikeluarkannya apakah benar hak dari pihak tersebut betul-betul terlanggar atau tidak.

Jika pada akhir proses perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut adalah benar, maka hakim akan memperbaiki putusannya yang terdahulu guna melindungi hak dari pihak ketiga tersebut. Sebaliknya jika perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu adalah tidak benar, maka putusan yang terdahulu tetap dipertahankan dan dilaksanakan secepatnya.

3. Adanya permohonan peninjauan kembali

Sebagai upaya hukum luar biasa, maka PK tidaklah menghalangi eksekusi, namun demikian dalam kasus tertentu dapat saja eksekusi ditangguhkan apabila benar-benar dengan dukungan bukti yang kuat, seperti diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, yang diperkirakan permohonan PK tersebut akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka atas izin ketua pengadilan tingkat banding, eksekusi tersebut dapat ditangguhkan, karena dengan dikabulkannya permohonan PK tersebut, sedangkan barang/obyek perkara sudah terlanjur dieksekusi, maka sangatlah sulit untuk memulihkan barang/obyek tersebut seperti sediakala. Kalau sampai hal

semacam ini terjadi, maka pihak termohon eksekusi hanya dapat mengajukan gugatan baru terhadap pemohon eksekusi dengan petitum serta merta.

Pengajuan peninjauan kembali oleh pihak yang tereksekusi dilakukan setelah mendapatkan bukti baru kepada pihak pengadilan sehingga eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk sementara.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah :

- a. Apabila putusan tersebut didasarkan oleh kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti yang oleh hakim dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat atau bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang telah dituntut atau lebih daripada hal yang dituntut.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang tidak diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

4. Termohon mengerahkan preman-preman/massa di tempat barang yang akan dieksekusi

Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.

Muhammad Yusuf¹¹, selaku jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa:

Biasanya termohon eksekusi mengumpulkan orang-orang dibayar guna menghalang-halangi petugas eksekusi dalam menjalankan eksekusi. Kalau jurusita yang bertugas mengeksekusi dan aparat keamanan yang mendampingi jurusita tersebut tidak berhasil menanggulangi ulah dari preman/massa maka eksekusi tersebut gagal dilaksanakan.

Terhadap kejadian seperti ini perlu adanya tindakan yang tegas pada para penghambat eksekusi tersebut dengan ancaman *Contempt of Court* yang diancam dengan pidana penjara. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kewibawaan hukum terutama penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin menyatakan bahwa:

¹¹ Muhammad Yusuf (39 Tahun), Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 17 Mei 2017.

Pengeralahan massa di lapangan atau dilokasi eksekusi hanya untuk melindungi hak-hak kami. Massa ini juga bukan massa yang disewa tapi mereka semua adalah keluarga/sanak saudara yang merasa tidak terima juga ketika kepunyaan kami akan dieksekusi karna kami merasa bahwa memang ini adalah hak kami. Hanya saja kami tidak bisa menang di pengadilan.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa saat ini pelayanan yang dilakukan Pengadilan Negeri kepada pencari keadilan dalam hal pelaksanaan/eksekusi putusan perkara perdata belum sepenuhnya memuaskan. Dalam hal-hal tertentu masih dihadapkan kepada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan perkara perdata.

Oleh karenanya dipandang perlu untuk segera mencari terobosan-terobosan guna menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Sejalan dengan keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, maka Mahkamah Agung dalam melakukan pembaruan telah menetapkan visi misi organisasinya.

Adapun visi tersebut adalah, “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan member pelayanan hukum yang berkualitas etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik”.¹³

¹² Syamsuddin (42 Tahun), Warga Ritaya Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa, Wawancara, 20 Mei 2017.

¹³ *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI*, 2003, h. 1.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen. Bebas dari campur tangan orang lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparansi.¹⁴

Untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung tersebut diperlukan adanya suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi. Begitu pula agar Pengadilan Negeri dapat sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dalam melaksanakan/eksekusi putusan perkara perdata perlu pula untuk memahami dan mendalami permasalahan eksekusi yang didapat dilapangan.

¹⁴ Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI, h. 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Syarat-Syarat Putusan yang Dapat Dieksekusi

- a. Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
- b. Putusan yang Bersifat Kondemnatoir
- c. Permohonan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Telah Diajukan oleh Pemohon Eksekusi
- d. Pemohon Eksekusi Telah Membayar Biaya Eksekusi

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Tidak Dapat Dieksekusi

- a. Ketua Pengadilan menyatakan putusan tersebut noneksekutabel
- b. Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon
- c. Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga
- d. Adanya permohonan peninjauan kembali
- e. Termohon mengerahkan massa ditempat barang yang akan dieksekusi.

B. Implikasi Penelitian

1. Adapun saran penulis kepada para hakim agar supaya dalam menjatuhkan putusan benar-benar bertindak bijaksana dan lebih teliti sehingga dalam penerapannya nanti di lapangan dapat dilaksanakan dengan benar pada objek sengketa, sehingga tidak menyisakan persoalan dimasa yang akan datang. Sehingga pihak yang berperkara dapat merasa puas atas putusan yang diberikan. Dan kepada pihak pengadilan agar supaya dapat melaksanakan putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan dengan tidak lupa mengedepankan kemanusiaan dalam melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
2. Perlu digalakkannya penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam hukum, dan selain itu agar aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum. Juga demi kelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukan permohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauh sebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan II, 1998.
- Bahar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.
- Ginsburg, Morris. *Sociology*. London, 1934.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1997.
- Johnson, Hari M. *Sociology*. London: A Systematic Introduction, 1961.
- J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mahkamah Agung RI, Laporan Kegiatan Mahkamah Agung 2003-2004, Jakarta 2004.
- Mansyur Syah, Umar. *Hukum Acara Perdata Agama*. Bogor: Al- Umara, 1991.
- Metrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Maju, 1993.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Djambatan, Cetakan I, 1989.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nurjamal, Daeng dkk. *Terampil Berbahasa*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1993.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Robertson QC, Geoffrey. *Freedom, the Individual and the Law*. New York: Penguin Book, 1993.
- Rush, Michael. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Russell, Frances dan Loche, Christine. *English Law and Language*. London: Cassel, 1992.
- Saleh, Muhammad. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Graha Cendekia, Cetakan I, 2011.
- Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1992.

- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, Vol 2.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1984.
- Soeparmo, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- , *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Pradigma Paramita, 2002.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan III, 1993.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Stone, Richard. *Textbook on Civil Liberty*. London: Blackstone, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Yahya, M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, Cetakan III, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURJANNAH, dilahirkan di KabupatenGowatepatnya di KampungRitayaDesaKampiliKecamatanPallangpadatanggal 09 April 1996. AnakkelimadarienambersaudarapasanMuh. Saleh dan St. Sigollo. Penelitimenyelesaikanpendidikan di SekolahDasar di SDI Ritayapadatahun 2007. Padatahunitu juga penelitimelanjutkanpendidikan di SMP Negeri 2 Pallanggadantamatpadatahun 2010 kemudianmelanjutkanSekolahMenengahKejuruan di SMK Negeri 2 Sombaopu yang sekarangtelahberubahnamamenjadi SMK Negeri 3 Gowadanselesaipadatahun 2013. Padatahun 2013 penelitimelanjutkanpendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar, FakultasSyariahdanHukumpada Program StudiIlmuHukum. Penulissangatbersyukurtelahdiberikankesempatanuntukmenimbahilmupengetahuan di perguruantinggitersebutsebagaimbekalpenulisdalammengarungikehidupandimasa yang akandatang.

Penulisberharapapa yang didapatkanberupailmupengetahuandapatmengamalkannya di duniadanmendapatbalasanRahmatdari Allah swt.dikemudianhari, sertadapatbergunabagiuniversitastercintadanmembahagiakankedua orang tua, nenek, saudaradansemuakeluarga yang selalumendoakandanmemberikansegaladukungan yang tiadahentinya.